

KORBAN PENYEKAPAN DI MYANMAR

Belasan WNI Minta Segera Dipulangkan

JAKARTA (KR) - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penangkapan dan penyiksaan di Myanmar menunggu bantuan untuk segera dipulangkan ke tanah air. Mereka berharap pemerintah Indonesia segera memulangkan para WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu.

"Anak saya bersama belasan WNI lainnya sudah tidak kuat berada di sana. Kata mereka, mungkin kalau ada ponsel mereka bisa kasih bukti kejamnya keke-

rasan di sana," kata RD, ayah salah satu korban berinisial I, Rabu (22/1).

RD mengungkapkan bahwa pada 3 Januari, anaknya dan 12 WNI lain kabur dari perusahaan yang lama, tetapi upaya mereka gagal. Mereka 12 laki-laki dan seorang perempuan kemudian disekap di sebuah ruangan selama satu hari dua malam, seorang di antaranya ditampar oleh bos perusahaan tersebut. Setelah penangkapan itu, mereka dibawa ke pos gerbang pada 5 Januari. "Anak saya berpikir akan dipulangkan, sebab setelah in-

siden penamparan, mereka dijanjikan akan dipulangkan oleh tentara khusus dalam waktu 1-2 hari," kata RD.

Namun, mereka dijual ke perusahaan lain yang melakukan penyiksaan lebih berat. Para penjaga keamanan di perusahaan itu dilengkapi dengan alat penyetrus. "Anak saya dan yang lainnya benar-benar sudah menyerah dengan kondisi tersebut. Sudah tiga orang yang menjadi korban pemukulan parah. Mereka semua dipukul, bahkan disetrus," tuturnya. (Ant/Has)-f

SOAL WACANA PENUTUPAN PLENGKUNG GADING

Sultan: Uji Coba Belum Dilakukan

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal rencana penutupan Plengkung Gading dan penataan para pedagang di Kawasan Alun-alun Kidul (Alkid) Kraton Yogyakarta. Meski informasi soal rencana tersebut sudah beredar luas di masyarakat, Sultan menegaskan bahwa uji coba rencana itu belum dilakukan.

"Kalau untuk saat ini ya belum, wong di-

coba saja belum," kata Sultan Hamengku Buwono X saat dimintai tanggapannya soal rencana penutupan Plengkung Gading dan penataan pedagang di Kawasan Alun-alun Kidul di Kepatihan, Rabu (22/1).

Sultan mengatakan, pihaknya akan melakukan penataan dan bukan pengusuran. Dua rencana itu, kata Sultan, adalah amanat dari rekomendasi Unesco soal Sumbu Filosofi Yogya. "Ya penger-

jian ditata bukan berarti digusur. Kan baru percobaan aja, memungkinkin atau tidak," ujar Sultan.

Sebelumnya, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa Kraton Yogyakarta GKR Mangkubumi mengatakan, waktu uji coba penutupan belum ditentukan. "Baru uji coba. Saya tidak tahu (waktunya uji coba akan kapan)," ungkapnya. (Ria)-f



KR-Surya Adi Lesmana

PEMANDANGAN LANGIT: Seorang warga menikmati pemandangan langit takala matahari terbit di Perbukitan Batu Papal, Jalan Candi Ijo, Sambirejo, Prambanan, Sleman, DIY, Rabu (22/1/2025). Tempat ini menjadi destinasi masyarakat sebagai lokasi tamasya murah meriah terutama untuk menyaksikan Kawasan Sleman bagian Timur dari ketinggian.

DIBAWA KE KEJAGUNG

Dua Mobil Tersangka Impor Gula Disita

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua mobil milik tersangka HAT yang terlibat dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016. Mobil itu berjenis Mercedes Benz C 300 dengan nomor B-1019-OQ dan mobil Omoda dengan nomor B-1749-SNR.

"Benar, penyidik melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil tersangka HAT dari rumahnya di Jakarta," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Siregar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (22/1).

Hari menyebutkan mobil-mobil tersebut, sudah dibawa ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, untuk disita atas kaitannya dalam kasus tersebut. Penyidik masih terus meneliti dan mengkaji kemungkinan melakukan upaya-upaya penyitaan terhadap barang lainnya.

Seperti diketahui, HAT selaku Direktur PT DSI (Duta Sugar International) merupakan salah satu dari sembilan tersangka baru dalam kasus

impor gula ini. Delapan tersangka lainnya adalah TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (AP), WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furmindo (AF), HS selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), dan IS selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry (MSI).

Berikutnya TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene (MT), ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM), HFH selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur (BMM), dan ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU). Adapun HAT dan ASB tidak memenuhi panggilan penyidik dalam hari yang sama ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin (20/1).

Selasa (21/1), HAT berhasil ditangkap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kemudian langsung dibawa ke Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari yang sama. Sementara itu, ASB masih dicari oleh penyidik. (Ant/Has)-f

Warga

Warga berharap di sekitar Margokaton dan Banyurejo dapat dibuat seperti Kawasan Borobudur yang wilayahnya terintegrasi.

Hal senada diungkapkan Lurah Margokaton Anggit Bimanyu. Harapannya begitu exit tol berfungsi maksimal, dapat mendorong perekonomian masyarakat. Saat ini dampak yang dirasakan paling

besar terpotongnya saluran irigasi karena masuk dalam wilayah pembangunan tol. "Beberapa sudah diperbaiki. Hanya saja belum permanen," ungkapnya.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan jalan tol di Yogyakarta ini menurut Anggota Komisi B DPRD DIY Yan Kurnia, untuk yang mengarah ke Klanten Jawa Tengah sejauh ini sudah clear.

Hanya saja yang di dalam wilayah DIY sendiri ternyata termasuk rumit.

"Kami mendapat masukan dari beberapa peneliti sosial masyarakat, kalau dampak setelah nanti exit tol benar-benar difungsikan itu jarang dibicarakan. Kami mendorong dan mendukung jika ada kajian yang membahas mengenai hal ini," tegasnya. (Awh)-f

Tanggul

Kepala Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB Jarwansyah mengakui, kehadirannya di lokasi ini untuk melihat langsung dampak bencana sehingga pihaknya bisa melihat secara pasti korban terdampak dan kerusakan yang ditimbulkan.

"Pekan ini juga ada rapat koordinasi de-

ngan Pemprov Jateng dan kabupaten yang terdampak bencana alam, mengingat ada beberapa kabupaten yang terdampak hujan dan longsor untuk ditangani bersama-sama," ujarnya.

Salah satu langkahnya, yakni melakukan kaji cepat melihat cakupan lokasi kerusakan dan memastikan aktivasi posko

berjalan dengan baik untuk melayani masyarakat. "Terkait pencarian, pertolongan, dan evakuasi tentu tertangani dengan baik," ujarnya.

Perhatian lainnya, yakni terkait pemenuhan kebutuhan dasar terhadap mereka yang terdampak, harus terpenuhi dengan baik. (Ant)-f

Libatkan

menangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, seperti banjir di Demak dan Grobogan, serta tanah longsor di Pekalongan menelan banyak korban meninggal dunia," katanya.

Upaya menggunakan anjing pelacak membuah hasil, hingga Rabu siang tiga korban yakni NA warga Desa Songgodadi, TP warga Yosorejo, dan satu bayi berusia 5 bulan bernama AB (anak dari korban tewas IW warga Desa Kasimpar) berhasil ditemukan meski dalam kon-

disi meninggal dunia. Sejauh ini petugas telah mengevakuasi 20 korban meninggal yang tertimbun material longsor.

Selain fokus pada pencarian korban, Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto mengungkapkan, ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan relawan terus bekerja membuka akses jalan utama yang tertutup longsor di dua titik. "Kami sudah menurunkan 100 personel dan mendapat tamba-

han 200 personel dari Brimob dan Samapta Polda," jelasnya.

Pemkab Pekalongan menginformasikan hingga memasuki hari ketiga, jumlah korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono bertambah menjadi 20 orang dari sebelumnya 17 orang. Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menyebutkan, proses evakuasi dan pencarian korban meninggal dunia masih terus dilakukan meski kondisi cuaca mendung. (Cry/Ant)-f

Tenaga

untuk merancang rute pengiriman yang lebih efisien, sementara sektor perbankan dapat memanfaatkan AI untuk mendeteksi aktivitas penipuan secara real-time. Itu sebabnya TI dan AI di berbagai turunan komponennya kini menjadi aset yang sangat berharga.

Meskipun kebutuhan dan peluangnya semakin tinggi, terdapat sejumlah tantangan ke depan di Indonesia khususnya terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil di bidang AI.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan keterampilan. Menurut laporan dari World Economic Forum (2023), Indonesia masih memiliki kekurangan signifikan dalam tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknologi tingkat lanjut. Boleh jadi sistem pendidikan dan pelatihan yang ada sering kali belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Pendidikan tinggi yang khususnya dalam bidang AI terapan juga masih minim, itu sebabnya lembaga-lembaga pendidikan online seperti Coursera serapannya makin meningkat tajam.

Tantangan lainnya adalah terbentuknya zona nyaman sehingga komunitas cenderung bersifat resistensi terhadap perubahan. Dalam aspek disrupsi misalnya, banyak organisasi, masih mengkhawa-

irkan bahwa adopsi AI dapat menggantikan atau menghilangkan tenaga kerja manusia. Untuk mengatasi hal ini rasanya pemimpin perusahaan harus mampu mengelola disrupsi ini secara inklusif. Pelatihan ulang (reskilling) kepada karyawan yang ada agar mereka dapat beradaptasi dengan teknologi baru adalah salah satu contoh kebijakan yang harus dipertimbangkan.

Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan di atas masalahnya mereka tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu kolaborasi antara pemerintah, pendidikan tinggi dan sektor swasta harus mulai diwujudkan secara serius. Saat ini misalnya untuk mengatasi rendahnya literasi digital dan pengetahuan TI, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi digital, termasuk pelatihan keterampilan AI melalui program seperti Digital Talent Scholarship. Namun, langkah ini perlu diperluas dengan fokus pada pelatihan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.

Kurikulum sekolah dan universitas perlu diperbarui untuk mencakup keterampilan teknologi yang sesuai, termasuk pengenalan dasar-dasar AI sejak dini dan di berbagai bidang keilmuan. Ada kecen-

derungan pengkotak-kotakan bidang ilmu yang membuat sulitnya menerapkan bidang TI dan AI sebagai bagian organik kurikulum, kesulitan tersebut bersumber dari banyak aspek.

Ketidaktahuan, egosentris bidang ilmu bisa menjadi sumber.

Impaknya, ketidaktahuan yang sepele tetapi menjengkelkan dirasakan pengguna lulusan. Contohnya, belum lama ini teman saya saat memberikan instruksi kepada pegawai barunya agar men-share hasil kerjanya secara online, pegawai tersebut malah kebingungan, padahal pegawai tersebut seorang magister dalam bidang ilmu sosial yang kebetulan bidang keilmuannya tersebut kurang bersinggungan dengan TI.

Untuk itu, integrasi pendidikan TI dan AI akan membantu generasi muda mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Selain itu, kerja sama antara universitas dan perusahaan teknologi dapat membantu menciptakan program magang dan pelatihan yang lebih terarah, yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek teknologi dunia nyata. □-d

(Penulis - Guru Besar Informatika FTI UAJY dan Anggota Forum Ekonomi Digital.À, UAJY)

22 Negara

upaya untuk memblokir perintah eksekutif Trump. Gugatan tersebut, yang diajukan di Massachusetts, berargumentasi bahwa perintah Trump merupakan 'pelanggaran terang-terangan' terhadap Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS dan Pasal 1401 Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Platkin.

Trump dilantik sebagai Presiden AS pada Senin (20/1) dan menandatangani serang-

kaian perintah eksekutif yang telah memicu kontroversi baik di AS maupun di luar negeri. Sejumlah perintah yang memicu kontroversi itu antara lain mencakup penamaan Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, merujuk kartel sebagai organisasi teroris asing, pengenalan sah pemerintah AS yang hanya terbatas pada gender laki-laki dan perempuan, serta mundur dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) dan kesepakatan iklim Paris. (Ant/Has)-f

Menteri

Oleh karena itu, pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku.

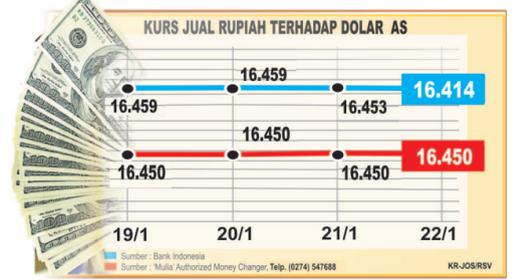
"Hari ini (kemarin) kita sudah panggil petugas itu oleh aparat pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik," ujarnya.

Sebelumnya, Nusron mengaku dirinya telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk juga memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Menteri ATR menyatakan, pemanggilan tersebut karena KJSB terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terkait proyek pagar laut tersebut, yakni sebuah kantor jasa survei yang berasal dari pihak swasta.

Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah pro-

sedur yang berlaku telah diikuti dan dijalankan dengan benar dalam proses pengukuran oleh KJSB tersebut atau tidak. Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan penelusuran awal, bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang SHGB, yang terdiri 234

bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut. (Ant/Obi)-d



Prakiraan Cuaca Kamis, 23 Januari 2025

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	22-30	65-95
Sleman	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	22-29	65-95
Wates	Cloudy	Cloudy	Cloudy	Cloudy	22-29	65-95
Wonosari	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	22-30	65-95
Yogyakarta	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	22-30	65-95



Akankah Kenaikan Pajak Berdampak pada Daya Beli Masyarakat?



PAJAK Pertambahan Nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar pada suatu negara

yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa. PPN ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara. PPN menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan karena kontribusinya sebesar 33 persen dari seluruh penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Kenaikan PPN ini hanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang mewah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah. Namun, Nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Terdapat pandangan negatif terkait kenaikan PPN yaitu

berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika PPN naik harga barang dan jasa juga ikut naik, sehingga masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi kelas menengah, yang memiliki pendapatan tetap dan harus mengalokasikan anggaran mereka untuk membeli barang dan jasa yang lebih mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat dapat menurun, terutama jika kenaikan PPN tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Selain itu, kenaikan tarif pajak memiliki implikasi signifikan terhadap pendapatan disposabel masyarakat. Pendapatan disposable (pendapatan

yang tersisa setelah pajak) akan berkurang, sehingga kemampuan masyarakat berkurang untuk melakukan konsumsi. Masyarakat akan merespon kenaikan tarif dengan mengurangi konsumsi barang sekunder atau tersier dan berfokus pada kebutuhan pokok. Pola konsumsi masyarakat akan berubah karena barang-barang mewah, hiburan dan wisata kemungkinan akan mengalami penurunan sehingga akan berdampak pada industri terkait. Kenaikan PPN juga berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi di masyarakat karena kelompok masyarakat menengah ke bawah akan mendapat dampak negatif yang lebih besar daripada

masyarakat berpenghasilan tinggi. Kesejahteraan masyarakat juga dapat menurun karena mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa. Selain itu, investasi dapat menurun karena investor tidak akan berinvestasi dimana negara membebaskan beban pajak yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan PPN juga dapat memiliki dampak positif, seperti meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki rasio pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah dapat memberikan insentif

pajak untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang pokok untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan pokok yang tinggi. Pemerintah dapat mengembangkan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan tarif ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada penegakan pajak yang lebih efektif. Dengan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap aturan perpajakan.